

BAB I

PENDAHULUAN

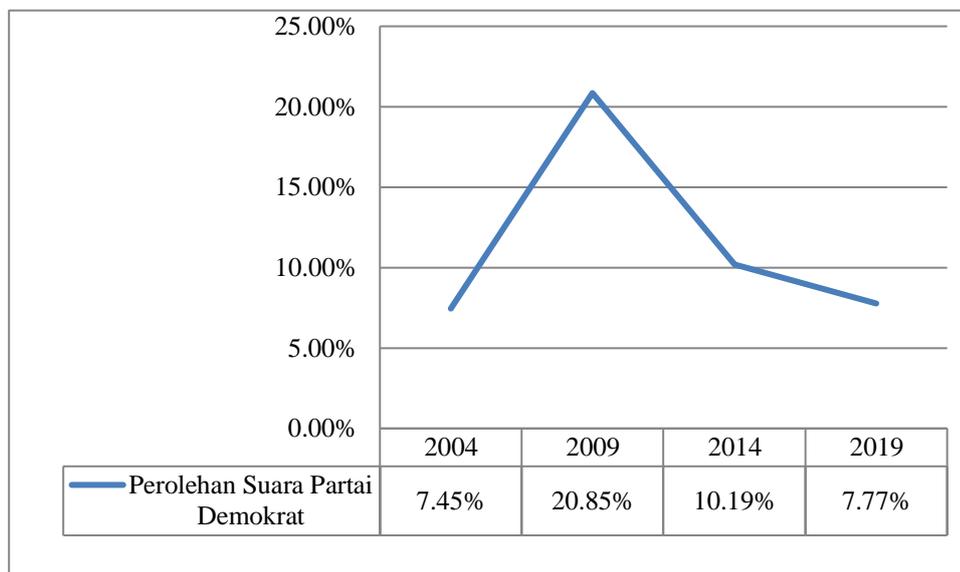
A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (pemilu) merupakan arena pertarungan disebuah negara demokratis yang diikuti para aktor politik terutama partai politik. Jika pemilu diibaratkan suatu perlombaan maka muncul dua kemungkinan pada hasil akhir yaitu kalah atau menang. Melalui pelaksanaan pemilu diharapkan dapat menciptakan suatu mekanisme pergantian kekuasaan secara damai, baik pelaksanaan pemilihan eksekutif maupun anggota legislatif. Pemilihan legislatif merupakan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi yang nantinya akan mendapat mandat sebagai wakil rakyat (Ariyoni, 2016). Pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif telah terselenggara sebanyak dua belas kali di Indonesia yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Perolehan suara yang didapat suatu partai dalam pemilu sangatlah bergantung pada bagaimana strategi yang diterapkan oleh partai politik itu sendiri, meskipun tetap terdapat berbagai faktor lain yang mempengaruhi perilaku pemilih. Dinamika perolehan suara pastilah menjadi suatu hal yang seolah wajib terjadi dalam tubuh partai politik. Salah satu partai yang mengalami terpaan kuat akan dinamika perolehan suara yaitu Partai Demokrat. Partai Demokrat merupakan partai juara pada pemilu 2004 dan juga 2009 yang kemenangannya mampu

membawa Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden selama dua periode berturut-turut. Sebagai partai baru yang berdiri pada tahun 2001, perolehan suara Partai Demokrat pada pengalaman awal sebagai kontestan pemilu di 2004 dapat dikatakan cukup gemilang, dimana dalam pemilu legislatif partai tersebut mampu menduduki posisi kelima peroleh suara terbanyak.

Gambar 1. 1 Grafik Perolehan Suara Partai Demokrat Pada Pemilu Legislatif Tingkat DPR Tahun 2004-2019



Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data KPU (2010, 2014, 2019)

Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat bagaimana dinamika perubahan perolehan suara Partai Demokrat pada tiap periode. Nampak perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu 2009 naik secara drastis hingga mencapai puncak kejayaan. Keberhasilan SBY dalam memenangkan kursi kepresidenan pada tahun 2004 dan 2009 juga dirasa berdampak pada naiknya popularitas Partai Demokrat. Selain itu, Demokrat bahkan disebut-sebut sebagai *the rising star* yang notabane

nya sebagai partai baru namun berhasil mengantongi pencapaian-pencapaian gemilang hingga menempati urutan tertinggi dalam perolehan suara pemilu legislatif 2009.

Dua periode tersebut menjadikan Demokrat serasa berada diatas awan. Namun pencapaian tersebut tak bertahan lama, dimana saat pemilu 2014 posisi Demokrat merosot tajam dan keadaan tersebut bertambah parah pada posisi Demokrat di tahun 2019 yang tak nampak pada lima besar peroleh suara tertinggi pemilu legislatif. Isu turunnya sosok bintang merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti. Turunnya perolehan suara tersebut seakan-akan sangat mengabaikan bagaimana sejarah gemilangnya Partai Demokrat dimasa lalu, dengan sosok mantan pemimpin negara yaitu SBY yang mampu menduduki kursi presiden kala itu seolah tidak membekas dihati masyarakat. Beberapa perubahan yang terjadi pada Partai Demokrat pastilah menjadi faktor-faktor turunnya perolehan suara di pemilu legislatif 2014 dan 2019. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penelitian ini tertarik untuk melakukan kajian mengenai “Pudarnya Sang Juara: Merosotnya Suara Partai Demokrat Pada Pemilihan Legislatif 2014 dan 2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini merumuskan bahwa permasalahannya adalah Partai Demokrat merupakan partai juara yang menjadi pemenang dua kali berturut-turut di pemilu 2004 serta 2009 seharusnya memiliki potensi menang pada periode berikutnya. Namun, justru pada pemilu legislatif 2014 dan 2019 Demokrat mengalami penurunan perolehan suara secara drastis. Untuk itu penelitian ini ingin

menyelidiki mengapa hal tersebut bisa terjadi, sehingga penelitian ini tertarik untuk mengajukan pertanyaan sebagai berikut “Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan merosotnya suara Partai Demokrat pada Pemilihan Legislatif 2014 dan 2019?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan merosotnya suara Partai Demokrat pada pemilihan legislatif 2014 dan 2019.

D. Manfaat Penelitian

Menurut peneliti, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan merosotnya perolehan suara partai.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu pembaca dalam memahami faktor penyebab merosotnya suara partai dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan khususnya untuk penelitian berikutnya tentang faktor penyebab turunnya perolehan suara partai politik.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan 20 literatur review dari artikel jurnal yang berbeda-beda tentu saja berkaitan dengan faktor penyebab merosotnya suara Partai Demokrat pada pemilu legislatif 2014 dan 2019. Tujuan kajian pustaka yaitu untuk mencari tahu persamaan dari penelitian yang akan diteliti dan juga mencari informasi untuk mendapatkan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Literature pada penelitian ini terbagi menjadi tiga klasifikasi yaitu: *pertama*, kajian tentang Partai Demokrat secara umum, *kedua*, kajian tentang faktor turunnya perolehan suara Partai Demokrat dan yang *ketiga*, tentang faktor turunnya perolehan suara partai selain Partai Demokrat.

Literatur yang membahas tentang Partai Demokrat secara umum terdiri dari lima artikel jurnal yaitu penelitian yang dilakukan oleh Honna (2012), Liddle & Mujani (2005), Mietzner (2012), Ritonga (2014) dan Saputro (2016). Partai Demokrat merupakan suatu partai yang lahir di era reformasi yang berangkat dari ide awal sekelompok kecil pengusaha dan akademisi yang telah mengenal sejak lama sosok mantan militer yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut menjadikan SBY dikenal sebagai sosok mantan pensiunan perwira angkatan darat yang pertama di Indonesia terpilih langsung sebagai presiden, mengalahkan petahana Megawati Soekarnoputri. Partai Demokrat merupakan sebuah partai yang sangat terkenal dalam dunia politik Indonesia karena telah berhasil mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono menduduki kursi kepresidenan selama dua periode berturut-turut yaitu pada periode 2004-2009 dan 2009-2014. SBY merupakan tokoh yang telah mampu membawa citra baik Partai Demokrat sebagai

partai yang bersih dan mendukung rakyat dengan posisinya sebagai Presiden. Tak hanya SBY, Anas Urbaningrum yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat juga memiliki kredibilitas baik dimata masyarakat karena cara pandanganya terhadap demokrasi (Honna, 2012; Liddle & Mujani, 2005; Mietzner, 2012). Namun, kredibilitas tersebut dipertanyakan saat nama Anas Urbaningrum tersangkut dalam dugaan kasus korupsi proyek Hambalang yang juga menyeret beberapa kader Partai Demokrat yang lain (Saputro, 2016). Sehingga diakhir-akhir masa kepemimpinan SBY terjadi kemungkinan rendahnya tingkat keterpilihan partai untuk menang pada pemilu legislatif yang merupakan langkah awal menuju pemilu presiden atau wakil presiden (Ritonga, 2014).

Kelompok literatur kedua membahas faktor turunnya perolehan suara Partai Demokrat yang terdiri dari sepuluh artikel jurnal yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2019), Heryanto (2009), Martinus (2013), Mentari (2018), Mustofa (2013), Rosana (2012), Sadono (2015), Sutisna (2017), Wahidin, Muhyidin, Iswahyuni & Ilmar (2020) dan Yustiningrum & Ichwanuddin (2015). Menurut Martinus (2013) dan Wahidin, Muhyidin, Iswahyuni & Ilmar (2020) menurunnya suara Partai Demokrat disebabkan oleh terjadinya *swing voter* yang mencapai sekitar 65% pada pemilih Demokrat di tahun 2009. Skandal korupsi yang dilakukan oleh kader demokrat merupakan sumber utama terjadinya *swing voter*. Kasus tersebut sangat berpengaruh terhadap penurunan citra partai, terlebih tidak adanya klarifikasi dan korelasi yang menjelaskan pada publik mengenai jargon anti korupsi dengan upaya yang serius mengenai pemberantasan korupsi oleh SBY. Meski kondisi Partai Demokrat telah kehilangan citra positifnya namun

tetap berupaya menopang berdirinya partai tersebut sebagai upaya cerminan negara demokrasi dengan salah satu ciri yaitu kehadiran parpol tetap terbentuk (Mentari, 2018; Rosana, 2012). Selain itu, kehadiran media massa yang menjadi penyebar berita skandal korupsi secara masif bahkan membesar-besarkan kasus tersebut memperparah penurunan citra Demokrat pada waktu itu. Media massa memang sangat memiliki peran sentral dalam dunia politik hingga mampu memengaruhi perilaku politik masyarakat. Padahal pemilu 2009, Demokrat merupakan salah satu partai yang sangat merasakan manfaat media massa untuk *marketing* politiknya, namun pada pemilu berikutnya media massa justru seakan tidak berpihak pada Demokrat. Apalagi tak sedikit ditemui media massa yang berada dibawah kepemilikan sosok kader ataupun ketua umum suatu partai politik sehingga seringkali nampak ketidak netralan. Tak jarang media seringkali digunakan untuk kepentingan politiknya dan mempengaruhi pilihan masyarakat melalui pembentukan citra suatu partai (Heryanto, 2009; Mustofa, 2013; Sadono, 2015; Yustiningrum & Ichwanuddin, 2015).

Partai Demokrat yang erat dengan tokoh SBY tak lagi mampu memanfaatkan kharisma SBY yang dinilai tidak lagi memiliki *magnitude* politik sebagai produk unggulan partai. Memang sangat nampak jika demokrat merupakan partai yang sangat mengandalkan popularitas tokoh sedangkan akar organisasi politiknya kurang diperhatikan. Sedangkan di pemilu 2019 latar belakang partai politik kurang dipertimbangkan, melainkan pilihan masyarakat cenderung langsung berorientasi pada figur calon legislatif itu sendiri (Fauzi, 2019; Mentari, 2018; Sutisna, 2017).

Kelompok literatur terakhir mengenai klasifikasi faktor turunnya perolehan suara partai selain Partai Demokrat yang terdiri dari lima artikel jurnal yaitu penelitian dari Fajari (2017), Nurhasim, Haris, Romli, Nuryanti, Amalia, Darmawan & Hanafi (2016), Romli (2016), Triono (2015) dan Yumitro (2014). Tak hanya Partai Demokrat, perolehan suara partai Islam sejak era reformasi juga cenderung mengalami penurunan. Faktor yang menyebabkan turunnya dukungan masyarakat terhadap partai Islam diantaranya tidak nampaknya penampilan syar'i dalam beberapa gerak perjuangan partai Islam. Padahal jika dilihat secara kuantitatif dominasi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dapat menjadi modal besar untuk basis perolehan suara. Namun pilihan politik pemilih "Islam" sendiri yang mempengaruhi masa depan partai Islam cenderung mengalami perubahan pendirian. Perubahan tersebut salah satunya disebabkan karena kegagalan beberapa partai Islam dalam mengelola harapan publik bahkan tak jarang masyarakat pemilih merasa kecewa saat beberapa kader partai Islam tersandung dalam kasus korupsi (Nurhasim, Haris, Romli, Nuryanti, Amalia, Darmawan & Hanafi, 2016; Romli, 2016; Triono, 2015; Yumitro, 2014).

Berbeda halnya mengenai faktor turunnya perolehan suara *Cambodia People's Party* (CPP) di Kamboja yang justru dikarenakan semakin kuatnya oposisi yang melakukan penggabungan partai disertai strategi yang bagus dalam memobilisasi pemilih. Selain itu turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Hun Sen juga menjadi faktor turunnya perolehan suara CPP pada pemilu berikutnya (Fajari, 2017).

Tabel 1. 1 Ringkasan Literature Review

No	Jenis	Penulis	Temuan
1	Partai Demokrat Secara Umum	Honna (2012) Liddle & Mujani (2005) Mietzner (2012) Ritonga (2014) Saputro (2016)	Partai Demokrat berdiri atas inisiasi sekelompok kecil pengusaha dan akademisi yang telah mengenal sejak lama sosok mantan militer yang dijadikan figur demokrat yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Citra positif Partai Demokrat dapat terbentuk karena posisi SBY yang mampu menduduki kursi kepresidenan selama dua periode berturut-turut. Selain itu, citra positif demokrat juga terbentuk berkat kredibilitas Anas Urbaningrum yang baik dimata masyarakat, meskipun pada akhirnya kredibilitas tersebut dipertanyakan sejak tersandung kasus korupsi bersama beberapa kader demokrat yang lain.
2	Faktor Turunnya Perolehan Suara Partai Demokrat	Fauzi (2019) Heryanto (2009) Martinus (2013) Mentari (2018) Mustofa (2013) Rosana (2012) Sadono (2015)	Kasus korupsi yang menyeret beberapa kader demokrat menyebabkan terjadinya <i>swing voter</i> sehingga perolehan suara Demokrat merosot tajam. Kehadiran media juga mendukung tersebarnya secara masif berita skandal korupsi tersebut yang secara otomatis mampu menurunkan citra positif Partai Demokrat. Hal tersebut diperparah lagi dengan kondisi

		<p>Sutisna (2017)</p> <p>Wahidin, Muhyidin, Iswahyuni & Ilmar (2020)</p> <p>Yustiningrum&Ich wanuddin (2015)</p>	<p>media yang banyak dimiliki oleh kader ataupun ketua umum partai politik lain sehingga momentum ini dimanfaatkan untuk menurunkan citra positif demokrat dengan membesar-besarkan kasus korupsi yang terjadi ditubuh Partai Demokrat. Ketokohan dan kharisma SBY juga dinilai tak lagi memiliki <i>magnitude</i> politik yang mampu mempengaruhi pilihan masyarakat dan menyelamatkan citra Partai Demokrat.</p>
3	<p>Faktor Turunnya Perolehan Suara Partai Selain Partai Demokrat</p>	<p>Fajari (2017)</p> <p>Nurhasim, Haris, Romli, Nuryanti, Amalia, Darmawan & Hanafi (2016)</p> <p>Romli (2016)</p> <p>Triono (2015)</p> <p>Yumitro (2014)</p>	<p>Kasus turunnya perolehan suara juga dialami partai Islam di Indonesia yang salah satunya disebabkan oleh tidak nampaknya penampilan syar'i dalam beberapa gerak perjuangan partai Islam. Selain itu, kegagalan harapan publik akan partai Islam yang diharapkan menjadi pilihan terbaik sering dihancurkan dengan rasa kekecewaan karena beberapa kadernya tersandung dalam kasus korupsi. Skandal korupsi kekuasaan juga menjadi faktor merosotnya perolehan suara partai UMNO yang notabenehnya merupakan partai besar di Malaysia. Berbeda halnya dengan CPP di Kamboja yang harus mengalami penurunan perolehan suara karena kuatnya oposisi yang</p>

			melakukan penggabungan partai disertai strategi yang bagus dalam memobilisasi pemilih. Selain itu kegagalan kebijakan ekonomi pemerintahan Hun Sen juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap CPP.
--	--	--	---

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan kajian diatas, telah dijelaskan oleh beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan Partai Demokrat secara umum, faktor turunnya perolehan suara Partai Demokrat, serta faktor turunnya perolehan suara partai selain Partai Demokrat. Maka untuk pembeda dalam penelitian ini yaitu dimana penelitian sebelumnya belum ada yang membahas faktor merosotnya perolehan suara Partai Demokrat pada pemilihan legislatif 2014 dan 2019 terlebih pada penelitian ini akan menggunakan teori perubahan partai Harmel dan Janda, yang dimana teori tersebut belum pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Maka dari itu Penulis lebih memfokuskan penelitian ini pada analisa faktor penyebab merosotnya suara Partai Demokrat pada Pemilihan Legislatif 2014 dan 2019.

F. Kerangka Dasar Teori

Berdasarkan topik yang diangkat, penelitian ini menggunakan tiga teori yang digunakan diantaranya yaitu: teori perubahan partai, konsep partai politik dan konsep sistem pemilu.

1. Teori Perubahan Partai

Teori perubahan partai merupakan suatu teori yang berupaya untuk memberikan penjelasan mengenai mengapa partai mengubah strategi politik mereka ataupun karakteristik organisasi (Harmel & Janda, 1994). Hal tersebut sesuai dengan pandangan dari Robbins (2006) dalam Harahap (2020) yang mengungkapkan bahwa perubahan memang sangat diperlukan dalam suatu organisasi dalam upaya peningkatan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Sehingga jika dikaitkan dengan kondisi partai politik di Indonesia saat ini memang perlu melakukan suatu transformasi organisasi hingga regenerasi agar segala upaya yang dilakukan dapat relevan dimasa kini dan dimasa depan. Partai politik merupakan suatu organisasi yang mampu menjadi penghubung antara masyarakat dengan negara, namun saat ini justru sering dikecam oleh masyarakat karena dinilai gagal dalam mengartikulasikan berbagai aspirasi baru dan beragam yang muncul dimasyarakat modern saat ini. Wajah partai justru tampak mengecewakan masyarakat dimana partai hanya sibuk dan gagal menangani masalah internalnya sendiri dan tak pernah berujung mengalami konflik internal (Heywood, 2013; Harahap, 2020).

Melihat kondisi tersebut maka sangat diperlukan sikap pimpinan partai yang harus berkerja membawa partainya untuk berubah atau bertransformasi menjadi partai modern dengan manajemen organisasi yang transparan, akuntabel, responsif, komunikatif dan adaptif dalam menyikapi kedinamisan yang terjadi (Harahap, 2020). Jangan sampai partai yang notabenenya sebagai entitas publik justru berubah menjadi sangat berselera personal. Ketika ketergantungan pada sosok utama terjadi, maka kondisi ini akan membawa

organisasi sering kali mengalami kegagalan dalam mengembangkan berbagai alternatif tindakan yang diambil (Heryanto, 2020). Regenerasi juga menjadi hal yang wajib dilakukan ketika melihat perubahan demografi dimana pemilih semakin didominasi kaum muda, maka dalam pembuatan program, strategi, hingga pilihan cara berkomunikasi juga harus perlu diadaptasi agar tetap relevan. Ketika pimpinan partai politik mampu menghadirkan perubahan berupa regenerasi dan melakukan penyatuan antara anak-anak muda dan para senior, maka transformasi dan mesin partai akan berhasil membawa kinerja yang lebih efektif dan efisien dalam merebut hati pemilih terutama kelompok pemilih baru yang membawa peluang besar bagi suatu partai politik untuk duduk di kursi kekuasaan (Harahap, 2020). Teori perubahan partai yang dikemukakan oleh Harmel & Janda (1994) menyatakan bahwa perubahan tidak “terjadi begitu saja”, melainkan hasil dari perubahan kepemimpinan, perubahan faksi dominan di dalam partai, dan stimulus eksternal yang mendorong terjadinya perubahan. Teori perubahan partai oleh Harmel dan Janda ini memang tidak terlepas dari pengaruh beberapa teori sebelumnya bahkan dikatakan jika teorinya merupakan suatu campuran dan mencakup elemen dari beberapa teori pendahulunya, seperti teori dari Penebianco, Deschouwer serta Albinsson (Harmel & Janda, 1994).

Latar belakang penggunaan teori perubahan partai dari Harmel dan Janda dalam penelitian ini tidak terlepas dari alasan karena adanya kesesuaian realitas konflik internal pada tubuh Demokrat dan juga faktor eksternal lainnya yang mana hal tersebut dapat dibaca dengan teori Harmel dan Janda.

Perubahan ketua umum Partai Demokrat diawal tahun 2013 yang berpengaruh pula pada perubahan posisi faksi dominan yang ada dalam tubuh partai, merupakan suatu realitas konflik internal yang terjadi pada diri Partai Demokrat saat itu. Tak hanya secara internal, beberapa faktor eksternalpun terjadi seperti naiknya ambang batas presiden dan juga parlemen hingga perubahan pada strategi koalisi juga mewarnai dinamika Partai Demokrat menjelang Pemilu Legislatif 2014 dan 2019. Kesesuaian realitas konflik yang terjadi pada Demokrat dengan beberapa variabel yang ada di teori perubahan partai Harmel dan Janda, berupa variabel internal dan eksternal dengan beberapa indikatornya yang sangat selaras dengan konflik yang ada di Demokrat menjadikan alasan mengapa teori tersebut dipilih dalam penelitian ini.

Teori perubahan partai dari Harmel dan Janda merupakan gabungan atau penyempurnaan dari teori-teori sebelumnya juga menjadi salah satu alasan mengapa teori ini dipilih. Dari keberagaman variabel atau persepektif yang dimiliki teori ini akan menjadi penunjang dalam suatu penelitian, khususnya penelitian kualitatif. Semakin kompleks variabel yang digunakan dalam meneliti suatu peristiwa atau permasalahan, maka hasil penelitiannya juga akan lebih obyektif. Selain itu, nilai kebaruan juga menjadi aspek yang diperhatikan dalam penelitian ini. Berdasarkan beberapa *literatur review* yang telah dibaca, peneliti tidak menemukan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang faktor merosotnya perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilihan Legislatif 2014 dan 2019 dengan menggunakan

teori dari Harmel dan Janda, sehingga hal tersebut menjadi salah satu aspek kebaruan dalam penelitian ini.

Harmel & Janda (1994) membagi teori perubahan partai menjadi dua variabel yaitu variabel internal dan variabel eksternal. Variabel internal dalam teori perubahan partai Harmel dan Janda terdiri dari dua unsur yaitu perubahan kepemimpinan partai dan terjadinya perubahan faksi dominan. Sedangkan pada variabel eksternal terdapat beberapa indikator seperti reformasi konstitusional, ketersediaan dana kampanye, strategi koalisi dan keterlibatan kader dalam kasus korupsi. Perubahan kepemimpinan memiliki penjelasan bahwa perubahan personel kepemimpinan partai dapat menjadi bagian dari komitmen yang luas untuk terjadinya perubahan. Perubahan kepemimpinan dapat didasarkan pada berbagai alasan misalnya pemimpin dapat diganti karena alasan personal, seperti keputusan untuk mengejar kepentingan lain (misalnya bisnis, keluarga), kesehatan yang buruk, usia (pergantian generasi) atau bahkan kematian. Selain itu perubahan kepemimpinan dalam tubuh partai politik dapat pula disebabkan oleh adanya konflik internal yang mengharuskan perubahan kepemimpinan itu terjadi.

Selain perubahan kepemimpinan, perubahan faksi dominan merupakan indikator kedua dalam variabel internal teori Harmel dan Janda. Hampir semua partai memiliki faksi yang dapat diidentifikasi di dalamnya. Bahkan pada nyatanya beberapa partai teridentifikasi sebagai kumpulan faksi-faksi yang bersaing. Jika faksi-faksi yang ada dalam suatu parpol sangat berbeda dalam 'dasar-dasar' identitas ataupun strategi, maka faksi (atau koalisi faksi)

'dominan'lah yang akan memegang kendali. Tak hanya variabel internal, teori perubahan partai juga menyorot adanya variabel eksternal berupa rangsangan eksternal yang menjadi faktor pendukung terjadinya perubahan partai. Rangsangan eksternal yang mendorong terjadinya perubahan partai mencakup banyak faktor misalnya reformasi konstitusional yang relevan, keterlibatan kader dalam kasus korupsi, ketersediaan dana kampanye hingga mengenai strategi koalisi (Harmel & Janda, 1994).

Terjadinya reformasi konsitusional merupakan salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya suatu perubahan dalam partai. Reformasi konstitusional yang memiliki keterkaitan kuat dengan perubahan partai yaitu mengenai perubahan ambang batas parlemen dan perubahan ambang batas presiden. Tak hanya reformasi konstitusional, keterlibatan kader dalam kasus korupsi juga dapat menjadi faktor eksternal tak terduga yang mempengaruhi terjadinya perubahan perolehan suara suatu partai dalam pemilu. Ketersediaan dana kampanye juga menjadi indikator eksternal yang mana menjadi kekuatan tersendiri bagi partai politik untuk menggerakkan roda kepartaiannya dalam menghimpun dukungan masyarakat untuk kemenangan pada keikutsertaannya dalam kontestasi pemilu.

Penentuan strategi koalisi juga menjadi faktor eksternal yang menarik untuk diteliti. Dalam perbendaharaan politik, koalisi merupakan suatu gabungan dua atau lebih partai yang bergabung dengan tujuan untuk membangun suatu pemerintahan bersama. Koalisi merupakan suatu keniscayaan bagi negara yang menganut sistem multipartai yang tidak bisa

dihindari (Setyadi, 2017). Muller dan Storm mengemukakan bagaimana dilemanya partai politik dalam membuat keputusan yang bersinggungan dengan konflik tujuan. Dilema tersebut muncul ketika tidak adanya mitra koalisi yang mempunyai ideologi yang serupa yang diperlukan partai untuk mendukung calon dalam pilkada atau untuk membentuk pemerintahan. Dalam situasi dilema tersebut suatu pimpinan partai dan partai politik bisa saja mengubah perilakunya untuk mencapai tujuan yang berbeda (Hertanto & Sulaiman, 2013).

2. Konsep Partai Politik

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik merupakan suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk membela dan memperjuangkan kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan juga negara, serta memelihara ketahanan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara umum partai politik juga didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terorganisir serta mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Kelompok ini memiliki suatu tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, 2008). Partai politik merupakan kumpulan dari beberapa manusia yang terkumpul dalam suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan di suatu negara serta menguasai sistem pemerintahan melalui ideologi tertentu agar mendapatkan kesempatan pada pemilihan umum

sehingga mampu mewujudkan cita-cita politik negara secara konstitusional dalam melaksanakan kebijakan dengan dukungan masyarakat (Labolo & Ilham, 2015).

Secara konseptual, Neumann dalam Al-Hamdi (2020) mendefinisikan partai politik merupakan penyambung lidah kepentingan masyarakat melalui pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah serta berlomba untuk mendapatkan dukungan suara dalam pemilu. Menurut Al-Hamdi (2020) partai politik dapat diartikan sebagai suatu kelompok yang terikat atas keyakinan, kepentingan dan komitmen yang sama untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu muncul kemungkinan jika partai memiliki peran dalam menawarkan kebijakan alternatif kepada pemerintah atau menempati suatu jabatan publik untuk mendapatkan kekuasaan melalui mekanisme yang berlaku, terdapat 4 (empat) indikator dari partai politik, yakni (Mawazi, 2017) :

1. Kemampuan partai politik dalam menyesuaikan diri yang dapat diukur melalui usia partai politik, usia generasi anggota partai politik, dan fungsi dari partai politik.
2. Kesederhanaan dan kompleksitas. Partai politik sudah selayaknya terbentuk dari ideologi yang sederhana agar mempermudah pelaksanaan cita-cita mereka serta kompleksitas partai dalam suatu kelembagaan negara terkait isu-isu yang ada.
3. Otonomi dan subordinasi mengenai partai politik yang tidak selalu bergantung pada prosedur dan tanggap terhadap tindakan publik yang di butuhkan.

4. Solidaritas partai terkait kesatuan yang ada di suatu kelompok agar menjadi utuh dan selaras dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Para ilmuwan juga mengelompokkan partai politik menjadi beberapa klasifikasi, diantaranya diklasifikasikan secara ideologis. Menurut Al-Hamdi (2020) terdapat tiga klasifikasi partai politik secara ideologis yaitu nasionalis-sekuler, nasionalis-Muslim, dan nasionalis-Islamis. Dari ketiga pengelompokan tersebut dikelompokkan sebagai kekuatan nasionalis karena secara jelas asas pancasila dipilih sebagai asas partai baik yang tergabung dalam nasionalis-sekuler maupun nasionalis-Muslim. Selain itu para partai politik dengan kekuatan nasionalis-Islamis meskipun tidak secara terang-terangan mengadopsi pancasila sebagai ideologi mereka namun pada nyatanya mereka menerima nilai-nilai Pancasila sebagai nilai yang ada di dalam partai mereka sehingga dapat dikatakan jika pada dasarnya tidak ada bentuk ketidaksesuaian antara nilai Pancasila dengan Islam.

Selain itu, kondisi partai politik di Indonesia pasca 1998, terutama didasarkan pada hasil pemilu 2019 dikembangkan pula menjadi klasifikasi tersendiri yaitu klasifikasi berdasarkan kekuatan organisasi. Klasifikasi tersebut terbagi menjadi tiga kategori utama yaitu partai besar (*major parties*), partai menengah (*medium parties*), dan partai kecil (*small parties*). Hasil pemilu dijadikan penilaian utama dalam klasifikasi partai berdasarkan kekuatan organisasi karena melalui pemilu inilah dapat dilihat bagaimana penilaian dan evaluasi masyarakat terhadap kinerja parpol selama lima tahun sebelumnya (Al-Hamdi, 2020).

3. Konsep Pemilu Legislatif

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Andrew Reynold dalam Labolo & Ilham (2015) menyatakan bahwa pemilu legislatif merupakan tata cara dimana suara yang didapatkan oleh para kandidat dan partai pada kontestasi pemilihan diubah menjadi perolehan kursi-kursi yang dimenangkan dalam dewan perwakilan atau parlemen.

Pemilu legislatif memiliki tujuan untuk memilih anggota legislatif atau parlemen dimana parlemenlah yang akan menetapkan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan serta mengawasi kegiatan pemerintah demi kepentingan rakyat (Mahmud, 2018). Menurut Hadimin (2015) dalam ilmu politik, dikenal berbagai macam sistem pemilihan umum beserta variasinya, akan tetapi umumnya perkisar pada dua prinsip pokok yaitu *Single-member Constituency* dan *Multi-member Constituency*. Yang disebut dengan *Single-member Constituency* yaitu satu daerah pemilihan atau wilayah distrik memiliki satu wakil, biasanya disebut distrik. Sementara itu, *Multi-member Constituency* adalah satu daerah pemilihan memilih lebih dari satu atau beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau juga disebut sistem proporsional.

Pemilu juga menjadi suatu kontestasi atau ajang yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam kursi parlemen (Syafiie & Azhari, 2002). Pada Pemilu Legislatif 2014 dilakukan pemilihan untuk menentukan 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dimana pemilihan tersebut dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April 2014. Sedangkan untuk Pemilu Legislatif 2019 diselenggarakan pada 17 April 2019, dimana Pemilu Legislatif tersebut diselenggarakan bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu Presiden 2019. Pada Pemilu Legislatif 2019 sebanyak 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota akan ditentukan melalui penggunaan hak suara masyarakat secara langsung dengan pencoblosan dibalik bilik suara.

Setelah dilakukan proses pemungutan suara akan dilanjutkan proses penghitungan yang melalui proses ini akan nampak siapa yang kalah dan siapa yang banyak mendapat kepercayaan masyarakat untuk menjadi wakil mereka dalam parlemen. Dalam menghitung perolehan suara dalam suatu pemilu yang kemudian diubah menjadi kursi-kursi di badan legislatif, pemilihan sistem pemilu merupakan hal yang sangat menentukan siapa yang terpilih dan juga partai mana yang akan meraih kekuasaan (Reynolds, Reilly & Allis, 2005). Sebagai kompetisi politik, terdapat sejumlah aktor yang dilibatkan

dalam pelaksanaan pemilu. Masing-masing aktor mempunyai fungsi dan juga posisi tersendiri yang secara bersama memiliki kewajiban menyukseskan pelaksanaan pemilu. Menurut Sardini (2011), aktor-aktor tersebut dikelompokkan menjadi :

1. Aktor Utama Pemilu

a. Pemilih

Dalam konteks Indonesia, diantara aktor-aktor pemilu yang ada, posisi pemilih kerap kali terpinggirkan. Daftar pemilu selalu menjadi kontroversi dalam pelaksanaan pemilu. Padahal, hak-hak politik warganegara telah dijamin dalam konstitusi, termasuk dalam hal itu adalah hak memilih dalam pemilu.

b. Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya merupakan penyelenggara pemilu di Indonesia.

c. Peserta Pemilu

Baik dalam pemilu eksekutif maupun legislatif, partai politik selalu menjadi pelaku dominan dalam pelaksanaan pemilu.

2. Aktor Pendukung

a. Pemerintah

Keberhasilan pemilu sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Misalnya pengiriman logistik pemilu

ke tempat pemungutan suara, tidak akan berjalan tepat sasaran jika tidak ada dukungan yang baik dari pemerintah.

b. Lembaga Keamanan

Lembaga keamanan sangatlah penting dalam keberlangsungan pemilu. Hal ini karena sangatlah mungkin terjadi gesekan kepentingan diantara warga masyarakat.

c. Lembaga Penegak Hukum

Lembaga ini bertugas untuk mengontrol jalannya aturan yang sudah disepakati oleh semua pihak, termasuk jika terdapat kecurangan-kecurangan dalam pemilu.

d. Pemantau Pemilu

Pemantau pemilu adalah LSM, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri dan perwakilan negara sahabat yang telah mendaftar ke KPU dan telah memperoleh akreditasi untuk melaksanakan kegiatan pemantauan pemilu.

Dari semua aktor pemilu tersebut, haruslah saling bekerjasama untuk menciptakan pemilu yang sesuai dengan UUD 1945, yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Apabila salah satunya tidak berfungsi dengan fungsinya, maka penyelenggaraan pemilu akan mengalami masalah dan tidak akan berjalan secara maksimal (Sardini, 2011).

G. Definisi Konseptional

Konsep merupakan suatu istilah untuk menggambarkan suatu keadaan yang akan diteliti serta di dalamnya meliputi keadaan suatu individu maupun kelompok yang menjadi obyek penelitian. Konsep pada penelitian ini antara lain:

1. Teori perubahan partai merupakan suatu konsep untuk memberikan gambaran tentang alasan suatu partai mengalami perubahan, dimana perubahan partai tersebut dikaji dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
2. Partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisir yang memiliki cita-cita dan pandangan yang sama untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan melalui suatu kontestasi legal agar dapat mewujudkan programnya.
3. Pemilu legislatif merupakan suatu wujud pengimplementasian hak pilih dan hak dipilih dalam masyarakat untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk pada kursi parlemen untuk mengaspirasikan kepentingan rakyat yang telah memilihnya dalam kontestasi yang memiliki asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional sangat penting dalam menentukan indikator untuk menyelesaikan penelitian ini. Dengan adanya definisi operasional peneliti dapat menggunakan fokus yang ada dalam melihat permasalahan tersebut. Hal ini tentu akan mempermudah peneliti dalam melakukan identifikasi masalah serta

penyelesaiannya. Berikut definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. 2 Indikator Teori Perubahan Partai Harmel dan Janda

Variabel	Indikator	Alat Ukur
Variabel Internal	Perubahan Kepemimpinan	Apakah perubahan kepemimpinan dalam Partai Demokrat menjelang periode pemilu 2014 dan 2019 disebabkan oleh alasan personal (urusan keluarga, bisnis, usia, kematian) atau karena ada konflik internal partai yang mengharuskan terjadinya perubahan kepemimpinan?
	Perubahan Faksi Dominan	Apakah terjadi perubahan faksi dominan pada tubuh Partai Demokrat menjelang periode pemilu 2014 dan 2019?
Variabel Eksternal	Keterlibatan Kader dalam Kasus Korupsi	Bagaimana dampak tersandungnya beberapa kader Demokrat dalam kasus korupsi bagi Partai Demokrat di pemilu 2014 dan 2019?
	Reformasi Konstitusional	Bagaimana dampak naiknya <i>presidential threshold</i> (ambang batas presiden) bagi Partai Demokrat?
		Bagaimana dampak naiknya <i>parliamentary threshold</i> (ambang batas parlemen) bagi Partai Demokrat?
Ketersediaan Dana Kampanye	Sumber anggaran partai dari mana saja (Banpol dan sponsor)?	

	Strategi Koalisi	Bagaimana strategi koalisi yang dijalankan Partai Demokrat dalam menghadapi Pemilu 2014 dan 2019?
--	------------------	---

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan teori perubahan partai Harmel dan Janda

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi (2020) penelitian kualitatif adalah suatu upaya ilmiah untuk tujuan yang substantif dengan maksud menyelesaikan suatu permasalahan tertentu yang dilakukan secara mendalam, sistematis dan tanpa menghiraukan kaidah atau aturan yang berlaku. Maka dari itu jenis penelitian kualitatif sangat relevan dalam penelitian ini yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu target yang substantif dan mendalam akan persoalan mengenai faktor-faktor merosotnya perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilihan Legislatif 2014 dan 2019. Dimana persoalan tersebut akan dipecahkan sesuai dengan kaidah kualitatif melalui upaya rasionalisasi serta adanya penafsiran terhadap fakta yang ada dilapangan berdasarkan bukti-bukti empiris yang diperoleh peneliti. Melalui data-data yang terkumpul, dalam penelitian kualitatif peneliti dapat mendalami atau memaknai isi permasalahan sehingga hasil dan kesimpulan dari penelitian dapat objektif dan memberikan pemahaman secara mendalam kepada publik.

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena sangat relevan dengan topik yang diambil. Secara definitif, pendekatan studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif dengan titik tekan adanya kasus, bisa berupa satu kasus atau lebih yang terjadi dalam kehidupan untuk suatu tujuan tertentu dengan melibatkan berbagai sumber informasi (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi, 2020). Studi kasus penelitian ini adalah faktor penyebab merosotnya suara Partai Demokrat pada Pemilihan Legislatif 2014 dan 2019.

2. Sumber Data

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan sumber data atau bahan-bahan penelitian berdasarkan data-data kepustakaan. Data yang telah didapatkan serta dikumpulkan selanjutnya akan dipilih untuk ditampilkan dan dianalisis data literature yang berkaitan dengan topik penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui media massa. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui buku, jurnal, hasil wawancara dan proposal yang telah penulis susun.

3. Teknik Pengumpulan Data

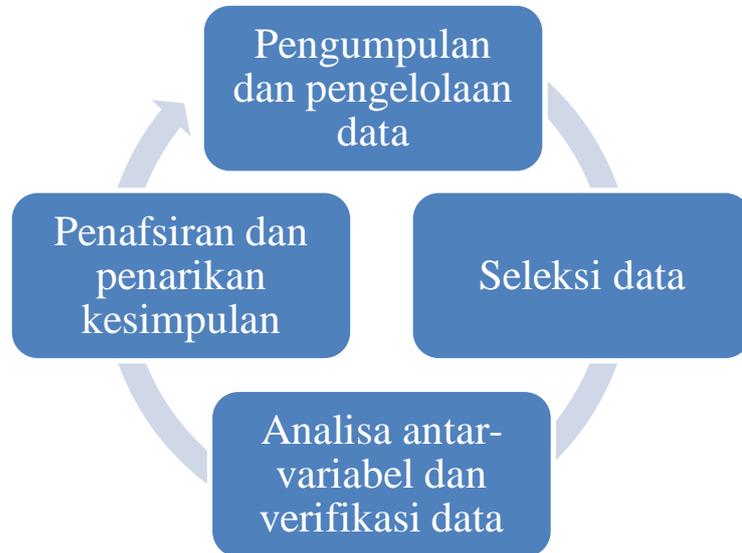
Teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan penelitian dari pihak terkait. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi. Teknik studi dokumentasi diterapkan peneliti dengan mengumpulkan data yang bersumber dari dokumentasi melalui media massa

daring misalnya portal berita dengan *track record* yang bisa dipercaya serta bisa pula melalui sosial media yang merupakan akun resmi lembaga. Selain menggunakan teknik studi dokumentasi, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara. Dimana wawancara merupakan suatu interaksi antara pewawancara dengan informan, dimana proses wawancara yang Penulis lakukan yaitu secara daring melalui *zoom platform* (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi, 2020). Sumber informasi atau informan yang Penulis wawancarai yaitu Gede Pasek Suardika, mantan politisi Partai Demokrat dan Andi Nurpati, anggota DPP Partai Demokrat Deputy Badan Pemenangan Pemilu.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses menggolongkan data serta menjadikannya lebih spesifik dan detail. Hal tersebut dilakukan agar data yang terkumpul dapat dipahami oleh pembaca sehingga hasil temuan yang diperoleh dapat secara mudah diinformasikan kepada orang lain. Menurut (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi, 2020) proses analisis data dapat dilakukan melalui empat langkah yaitu:

Gambar 1. 2 Empat Langkah dalam Analisis Data



Sumber: Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Efendi (2020)

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data: Pada tahap ini setelah proses pengumpulan data telah selesai, dilakukan proses penyalinan hasil rekaman suara wawancara menjadi teks. Data-data yang sudah terkumpul baik hasil wawancara ataupun data yang berupa fisik akan dipilih serta dipilah sesuai dengan indikator atau alat ukur yang sudah ditentukan.
- b. Seleksi data: Tahap ini berisi tentang kegiatan memilih data yang relevan dan berguna dalam proses analisis, selain itu data-data yang kurang relevan dengan topik penelitian akan disisihkan.
- c. Analisis antar-variabel dan verifikasi data: Setelah melalui langkah seleksi data selanjutnya tahap mengkaitkan temuan satu variabel dengan variabel yang lain. Selain itu terdapat tahap yang penting yaitu verifikasi data, proses ini dilakukan jika terjadi ketidakcoockan data yang ditemui peneliti

maka dianjurkan mengonfirmasi kepihak terkait agar validitas analisis dapat dipertanggung jawabkan.

- d. Penafsiran dan penarikan kesimpulan: Tahap penafsiran merupakan langkah untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan analisis antar-variabel dan verifikasi data. Hasil penafsiran tersebut merupakan dasar dari ditariknya kesimpulan yang menjadi bab akhir dari rangkaian penelitian. Implikasi teoritis, implikasi praktis, saran dan juga rekomendasi juga perlu dicantumkan pada bagian kesimpulan.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan kemudahan dalam pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terencana yaitu:

Bab I, Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Dasar Teori, Definisi Konsepsional, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Gambaran Objek Penelitian. Dalam bab ini akan dibahas tentang profil Partai Demokrat.

Bab III, Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian mengenai faktor-faktor penyebab merosotnya perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu legislatif 2014 dan 2019.

Bab IV, Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.